

EVALUASI DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU LUAR NEGERI

Roszamania B. Haji¹, Rizki Ardelia², Teresa Rachel Ayu Pracheta³
^{1,2,3} Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Alamat e-mail : roszamania@gmail.com

ABSTRACT

Elections are a crucial pillar of democracy where citizens determine leaders through fair and transparent voting processes. Abroad, elections also receive special attention as they involve Indonesian citizens living in various countries. This study aims to evaluate the distribution of election logistics abroad, identify the hindering factors, and provide recommendations for improving the election logistics distribution process in the future. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach. The results show that the main challenges in the distribution of election logistics abroad include the large volume of logistics, delays in logistics delivery, and the scattered distribution of voters across various countries and regions. To overcome these challenges, improved coordination, careful planning, and enhanced competence of logistics management and implementation personnel are required.

Keywords: Election Logistics Distribution, Elections, Evaluation, Political Participation, Logistics

ABSTRAK

Pemilu merupakan pilar demokrasi penting di mana warga negara menentukan pemimpin melalui proses pemilihan yang adil dan transparan. Di luar negeri, pemilu juga menjadi perhatian khusus karena melibatkan WNI yang tinggal di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi distribusi logistik pemilu di luar negeri, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses distribusi logistik pemilu di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri meliputi volume logistik yang besar, keterlambatan pengiriman logistik, dan penyebaran pemilih yang tersebar di berbagai negara dan wilayah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan koordinasi, perencanaan yang matang, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pelaksana logistik pemilu di luar negeri.

Kata Kunci: Distribusi Logistik, Pemilu, Evaluasi, Partisipasi Politik, Logistik

A. Pendahuluan

Pemilu, atau pemilihan umum, merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling fundamental di mana warga negara diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka

melalui proses pemilihan yang adil dan transparan (Kirana et al., 2024). Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan pemimpin politik, tetapi juga menjadi indikator penting dari tingkat demokrasi dan partisipasi

politik dalam suatu negara. Di Indonesia, pemilu diadakan secara berkala untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan perwakilan daerah (Indradjaja et al., 2022). Proses ini melibatkan jutaan warga negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Di luar negeri, pemilu juga menjadi perhatian khusus karena melibatkan warga negara Indonesia yang tinggal di berbagai negara (Setiawan, 2020). Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Kambu, 2021). Namun, pelaksanaan pemilu di luar negeri menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan unik. Salah satu tantangan utama adalah distribusi logistik pemilu yang melibatkan pengiriman dan pengelolaan bahan-bahan pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan peralatan pemungutan suara ke berbagai negara di seluruh dunia.

Distribusi logistik pemilu di luar negeri menghadapi berbagai kendala yang perlu dievaluasi untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan adil (Marwiyah, 2024). Tantangan-tantangan ini mencakup aspek geografis, waktu, dan volume logistik yang besar. Aspek geografis menjadi kendala utama karena warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tersebar di berbagai negara dengan kondisi geografis yang beragam (Ginting, 2016). Beberapa negara memiliki wilayah yang sangat luas dan terpencil, sehingga menjangkau lokasi pemungutan

suara menjadi sangat sulit. Misalnya, di Amerika Serikat, warga negara Indonesia tersebar di berbagai negara bagian dengan perbedaan zona waktu yang signifikan. Hal ini membuat koordinasi dan distribusi logistik menjadi lebih kompleks (Aswandi & Roisah, 2019).

Aspek waktu juga menjadi tantangan utama dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri. Keterlambatan pengiriman logistik sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pemilu, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional (Bachtiar et al., 2023). Selain itu, perbedaan zona waktu antara Indonesia dan negara-negara di luar negeri juga mempengaruhi waktu distribusi logistik (Sudiantini et al., 2023). Misalnya, pengiriman logistik dari Jakarta ke New York memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengiriman dalam negeri, sehingga perlu perencanaan yang matang untuk memastikan logistik tiba tepat waktu.

Volume logistik yang besar menjadi tantangan lain dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri. Bahan-bahan pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan peralatan pemungutan suara memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar dan pengelolaan yang baik. Selain itu, pengiriman logistik ke berbagai negara juga memerlukan biaya yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi untuk

mengatasi kendala-kendala ini (Bachtiar et al., 2023).

Evaluasi distribusi logistik pemilu di luar negeri sangat penting untuk memastikan bahwa hak pilih warga negara Indonesia di luar negeri dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas dan

efisiensi distribusi logistik pemilu. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan proses pemilu di luar negeri dapat berjalan lebih lancar dan adil, sehingga partisipasi politik warga negara Indonesia di luar negeri dapat lebih maksimal. Adapun data persebaran WNI di luar negeri pada tahun 2023 dituangkan dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Persebaran WNI di Luar Negeri Tahun 2023

No.	Negara	Jumlah WNI (orang)
1	Malaysia	3.500.000
2	Belanda	1.700.000
3	Arab Saudi	1.000.000
4	Taiwan	300.000
5	Singapura	198.444
6	Hong Kong	168.214
7	Amerika Serikat	142.000
8	Uni Emirat Arab	111.987
9	Brunei Darussalam	80.000
10	Suriname	80.000

Sumber: (Aditya, 2023)

Berdasarkan uraian latar belakang, urgensi penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa hak pilih warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat terlaksana dengan baik dan adil. Pemilu merupakan sarana penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin mereka, dan hak ini harus dijamin pelaksanaannya tanpa hambatan yang berarti. Evaluasi distribusi logistik pemilu luar negeri menjadi sangat penting karena melibatkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pemilu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat

mempengaruhi distribusi logistik pemilu.

Permasalahan yang sering muncul dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri meliputi keterlambatan pengiriman logistik, kesulitan dalam menjangkau lokasi pemungutan suara yang tersebar, serta kendala dalam pengelolaan waktu yang tepat untuk distribusi logistik. Keterlambatan pengiriman logistik sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pemilu dan perusahaan logistik internasional, serta perbedaan zona waktu yang signifikan antara negara-negara. Selain itu, penyebaran pemilih yang tersebar di berbagai negara dan wilayah membuat distribusi logistik

menjadi lebih kompleks, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi distribusi logistik pemilu di luar negeri, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi distribusi logistik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses distribusi logistik pemilu di masa mendatang.

B. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri, termasuk keterbatasan infrastruktur, kendala geografis, dan perbedaan waktu yang signifikan antara negara-negara. Penelitian Budhiarti (2024) menyatakan bahwa prinsip penentuan biasa yang demokratis merupakan hak seleksi umum ataupun umum suffrage. Prinsip ini mewajibkan tiap orang berusia mempunyai hak seleksi yang serupa tanpa melainkan tipe kemaluan, suku bangsa, kaum, bahasa, agama, mengerti politik, kekayaan, ataupun status yang lain. Dalam penajaan pemilu, negeri menjamin hak seleksi masyarakat negeri Indonesia bagus yang terletak di dalam ataupun luar negara.

Bersumber pada pengalaman penajaan pemilu tahun 2024 di luar negara, butuh dicoba koreksi bagus dari pandangan peraturan perundang-undangan ataupun manajemen pemilu. Mengenang tantangan serta halangan dalam

pemutakhiran pemilih di luar negara, butuh dipikirkan aplikasi sistem stelsel aktif di mana masyarakat negeri Indonesia di luar negara dengan cara aktif tiba ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) buat memasukkan diri selaku pemilih sekalian mengantarkan tata cara pemakaian hak seleksi, ialah lewat pos, Tempat Pemungutan Suara (TPS), ataupun Kotak Suara Kisaran (KSK).

Wawasan ialah ketentuan profesionalitas, alhasil eksekutor pemilu selayaknya melakukan kewajiban bersumber pada wawasan serta pengalaman pemilu. Mengenang regulasi pemilu senantiasa hadapi pergantian, koreksi rekrutmen PPLN serta edukasi teknis butuh dicoba buat tingkatkan mutu SDM eksekutor pemilu di luar negara supaya menguasai semua metode jasa hak politik WNI di luar negara. Mutu pemilu antara lain ditetapkan oleh kesertaan pemilih. Salah satu aspek yang pengaruhi kesertaan pemilih di luar negara merupakan akses informasi serta data. Pemilih butuh menemukan akses data yang mencukupi terpaut visi tujuan partisipan pemilu dan bukti diri calon. Oleh sebab itu, UU Pemilu butuh menata satu ayat spesial mengenai penajaan pemilu di luar negara.

Riset Warganegara (2019) melaporkan kalau pengurusan peralatan pemilu dengan cara elementer berjalan dengan cara tertata, analitis, serta diiringi mutu aturan mengurus peralatan yang terukur bagus dalam manajemen

pemograman keinginan peralatan, logistik bermacam alat serta infrastruktur peralatan, perawatan semua material peralatan, pembagian peralatan dari pusat sampai ke titik terakhir tempat pemungutan suara, dan pengurusan serta penindakan benda peralatan sesudah penerapan pemilu berakhir.

Dibutuhkan sesuatu tata cara pengurusan peralatan pemilu dengan cara elementer, berdaya guna, serta efisien supaya pengurusan kaitan cadangan peralatan pemilu dengan cara kualitatif bisa membagikan cerminan penindakan bermacam permasalahan aturan mengurus peralatan pemilu dengan cara rinci serta global. Penerapan pengurusan peralatan pemilu berplatform kompetensi SDM pengelola serta eksekutif peralatan pemilu dalam usaha membenarkan kalau susunan kegiatan pemograman, logistik, perawatan, pembagian peralatan pemilu sampai pengurusan peralatan sesudah pemilu bisa ditangani oleh SDM KPU yang bermutu cocok kompetensinya tiap-tiap di bermacam tingkat manajemen KPU.

Riset Zulkarnaen et angkatan laut(AL). (2020) melaporkan kalau pengurusan peralatan pemilu dengan cara elementer berjalan dengan cara tertata serta analitis, diiringi dengan mutu aturan mengurus peralatan yang terukur bagus dalam manajemen pemograman keinginan peralatan, logistik bermacam alat serta infrastruktur peralatan, perawatan semua material peralatan, pembagian peralatan dari pusat sampai ke titik terakhir Tempat

Pemungutan Suara, dan pengurusan serta penindakan benda peralatan sesudah penerapan pemilu berakhir.

Dibutuhkan sesuatu tata cara pengurusan peralatan pemilu yang elementer, berdaya guna, serta efisien supaya pengurusan kaitan cadangan peralatan pemilu dengan cara kualitatif bisa membagikan cerminan penindakan bermacam permasalahan aturan mengurus peralatan pemilu dengan cara rinci serta global. Penerapan pengurusan peralatan pemilu berplatform kompetensi SDM pengelola serta eksekutif peralatan pemilu dalam usaha membenarkan kalau susunan kegiatan pemograman, logistik, perawatan, pembagian peralatan pemilu sampai pengurusan peralatan sesudah pemilu bisa ditangani oleh SDM KPU yang bermutu cocok kompetensinya tiap-tiap di bermacam tingkat manajemen KPU.

Dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri, penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan logistik yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa logistik pemilu dapat didistribusikan tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pengelolaan rantai pasokan logistik pemilu yang efisien dan efektif menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur, kendala geografis, dan perbedaan waktu antara negara-negara. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pelaksana logistik pemilu di luar negeri juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan logistik pemilu

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pengembangan supply chain management yang berbasis pada pengembangan kompetensi SDM untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi logistik pemilu di luar negeri.

Penelitian Suwartono (2023) menyatakan bahwa pembentukan Dapil Luar Negeri, walaupun sudah jadi artikel lama, belum terselenggara serta belum ditanggapi sungguh-sungguh oleh penguasa ataupun pembuat hukum. Sepanjang ini, hasil suara dari para pemilih luar negara dalam pemilu buat badan DPR ditunjukkan ke Dapil DKI Jakarta II. Kebijaksanaan ini dikira tidak pas serta mudarat keterwakilan masyarakat negeri Indonesia di luar negara. Macam rumor serta kasus masyarakat negeri Indonesia di luar negara pula berlainan dengan kasus masyarakat di dalam negara. Alhasil, penaruhan pemilih luar negara ke dalam area Dapil DKI Jakarta II dikira belum bisa penuhi keterwakilan masyarakat negeri Indonesia di luar negara.

Pada Tetapan No 2 atau PUU-IX atau 2013, Dewan Konstitusi sudah membenarkan kalau pembuatan Dapil Luar Negara ialah open sah policy alhasil tidak tak mungkin di setelah itu hari bisa dibangun. Pada tetapan itu, Dewan Konstitusi menerangkan kalau pangkal permasalahan tidak terwakilinya harapan masyarakat negeri Indonesia di luar negara

merupakan kesuntukan komunikasi. Oleh sebab itu, pembuatan Dapil Luar Negara wajib bisa mendesak lahirnya calon legislatif yang dekat serta menguasai kasus yang dialami oleh masyarakat negeri Indonesia di luar negara. Riset ini mengusulkan pada pembuat hukum, Komisi Penentuan Biasa, serta penguasa buat bisa mangulas pembuatan Dapil Luar Negara. Ulasan ini wajib mengaitkan faktor diaspora Indonesia yang sudah terwadahi dalam banyak perkumpulan, tercantum PPI Bumi, buat membagikan pemikiran serta aspirasinya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam dan detail. Penelitian ini memerlukan pembahasan tentang keabsahan data. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan setelah suatu masalah diteliti secara kuantitatif, namun belum terungkapkannya penyelesaiannya secara memuaskan. Dapat dikatakan bahwa jika kita ingin mengetahui lebih mendalam tentang suatu masalah dan sulit membuat asumsi-asumsi, maka penelitian yang cocok dilakukan adalah kualitatif (Rusli, 2021).

Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kejadian atau fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok

individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peta Penyebaran Orang Indonesia di Luar Negeri

Menjelang Pemilihan Umum 2024, suara warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri semakin mendapat perhatian. Pemilu kali ini tidak hanya menjadi ajang bagi mereka yang berada di dalam negeri, tetapi juga melibatkan komunitas Indonesia di berbagai belahan dunia. Demokrasi tidak lagi dibatasi oleh geografis, dan Pemilu 2024 membuka pintu bagi WNI di luar negeri untuk berpartisipasi dengan

deskriptif (Rusli, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal.

harapan yang sama. Meskipun selama ini WNI yang merantau mungkin merasa jauh dari pusat kebijakan dan pengambilan keputusan di tanah air, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk memberikan suara, menyuarakan aspirasi, dan menjadi bagian dari proses demokrasi yang akan membentuk nasib bangsa. Melalui Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), KPU memberikan wadah untuk merekam suara dari setiap sudut dunia. Berikut adalah tabel persebaran DPTLN terbanyak:

Tabel 2. Data Persebaran Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Tahun 2024

No.	Negara, Kota	Jumlah Pemilih Tetap (orang)
1	Malaysia, Kuala Lumpur	447.258
2	Taiwan, Taipei	230.307
3	Hong Kong	164.691
4	Malaysia, Johor Baru	119.491
5	Singapura	106.515
6	Malaysia, Kota Kinabalu	98.669
7	Malaysia, Kuching	64.900
8	Malaysia, Tawau	59.442

Sumber: (Iswenda, 2024)

Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, timbul selaku pusat kesertaan WNI dalam Pemilu 2024. Dengan nilai menggapai 447. 258 DPTLN, kota ini jadi ikon kedamaian serta kegiatan komunitas Indonesia di Malaysia. Suara dari para WNI di Kuala Lumpur menghasilkan akibat yang penting, menunjukkan kedudukan berartinya dalam memastikan arah politik Indonesia. Kota Taipei, Taiwan, menaiki antrean kedua dengan jumlah sebesar 230. 307 DPTLN. Di balik bercelak kota

modern ini, WNI di Taiwan tidak cuma men catat kedatangan raga, namun pula membagikan partisipasi jelas dalam membagikan format garis besar pada Pemilu 2024. Suara dari Taipei jadi jembatan berarti antara Indonesia serta negara-negara di Asia Timur (Iswenda, 2024).

Hong Kong pula terdaftar mempunyai jumlah DPTLN yang besar, ialah sebesar 164. 691 DPTLN. Dengan lokasinya yang penting, Hong Kong tidak cuma jadi pusat finansial, namun pula pentas

berarti untuk suara dari luar negara yang berfungsi dalam membuat denah politik Indonesia. Balik ke Malaysia, kota Johor Terkini mempunyai 119. 491 DPTLN. Kota ini jadi saksi kedudukan istimewa komunitas Indonesia di area selatan Malaysia. Sedemikian itu pula di Singapore, dengan 106. 515 DPTLN, yang membagikan gairah bonus dalam keanekaan suara yang membuat cerminan politik Indonesia.

Berpindah ke Sabah serta Sarawak, kota-kota semacam Kota Kinabalu (98. 668), Kuching (64. 900), serta Tawau (59. 442) menghasilkan gradasi berlainan. Tiap-tiap memantulkan kenyataan istimewa dari suara WNI di Malaysia. Tidak cuma selaku pengamat, namun selaku bintang film penting dalam perhelatan kerakyatan, WNI di luar negara mengamalkan suara yang sekelas dengan rekan-rekan mereka yang terletak di dalam negara. Data-data itu bukan cuma nilai, namun kisah-kisah hidup serta harapan yang membuat suara dari luar negara. Suara dari tiap kota itu silih berhubungan, merangkai hubungan istimewa dalam ekspedisi mengarah Penentuan Biasa 2024 yang menakutkan (Iswenda, 2024).

2. Pemilihan Pilpres Tahun 2024

Pemilihan Presiden (Pilpres) di Indonesia tahun 2024 menjadi momen krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia, terutama karena melibatkan partisipasi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri (Nusantara, 2017). Partisipasi WNI di luar negeri dalam Pilpres 2024 tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap proses demokrasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan

dalam menentukan arah politik dan kepemimpinan nasional. Dalam konteks ini, evaluasi distribusi logistik pemilu di luar negeri menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak pilih WNI di luar negeri dapat terlaksana dengan baik dan adil (Ginting, 2016).

Salah satu tantangan utama dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri adalah keterbatasan infrastruktur dan kendala geografis. WNI yang tersebar di berbagai negara dengan kondisi geografis yang beragam membuat distribusi logistik menjadi lebih kompleks. Hal ini membuat koordinasi dan distribusi logistik menjadi lebih sulit dan memerlukan perencanaan yang matang (Aswandi & Roisah, 2019).

Selain itu, keterlambatan pengiriman logistik sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pemilu, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional. Perbedaan zona waktu antara Indonesia dan negara-negara di luar negeri juga mempengaruhi waktu distribusi logistik. Volume logistik yang besar juga menjadi tantangan lain dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri. Bahan-bahan pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan peralatan pemungutan suara memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar dan pengelolaan yang baik. Selain itu, pengiriman logistik ke berbagai negara juga memerlukan biaya yang signifikan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara KPU, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional. Peningkatan koordinasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan

teknologi seperti sistem pelacakan logistik dan aplikasi mobile untuk pemilih. Selain itu, perencanaan yang matang dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan logistik pemilu tiba di lokasi pemungutan suara tepat waktu. Perencanaan ini meliputi penentuan jadwal pengiriman yang tepat, pemilihan moda transportasi yang efisien, dan penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai di lokasi pemungutan suara (Suwartono, 2023).

Peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pelaksana logistik pemilu di luar negeri juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan logistik pemilu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM KPU di luar negeri dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa seluruh prosedur pelayanan hak politik WNI di luar negeri dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Tantangan dan Faktor Penghambat

Distribusi logistik pemilu di luar negeri menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan adil. Tantangan-tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu kargo, waktu, dan lokasi.

Salah satu tantangan utama dalam distribusi logistik pemilu di luar negeri adalah volume logistik yang besar. Bahan-bahan pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan peralatan pemungutan suara memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar dan pengelolaan yang baik. Volume logistik yang besar ini sering kali menjadi masalah

karena memerlukan koordinasi yang ketat antara pihak penyelenggara pemilu, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional. Selain itu, pengiriman logistik ke berbagai negara juga memerlukan biaya yang signifikan, yang dapat menjadi beban tambahan bagi anggaran pemilu (Bachtiar *et al.*, 2023).

Keterlambatan pengiriman logistik sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang. Koordinasi yang buruk antara pihak penyelenggara pemilu, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman logistik. Selain itu, perbedaan zona waktu antara Indonesia dan negara-negara di luar negeri juga mempengaruhi waktu distribusi logistik. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif pada proses pemilu, karena dapat mengakibatkan keterlambatan dalam persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara (Indradjaja *et al.*, 2022).

Penyebaran pemilih yang tersebar di berbagai negara dan wilayah membuat distribusi logistik menjadi lebih kompleks. Beberapa lokasi pemungutan suara berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau, yang menambah kesulitan dalam distribusi logistik. Misalnya, di Amerika Serikat, WNI tersebar di berbagai negara bagian dengan perbedaan zona waktu yang signifikan. Hal ini membuat koordinasi dan distribusi logistik menjadi lebih sulit dan memerlukan perencanaan yang matang. Selain itu, beberapa lokasi pemungutan suara berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di pedalaman Malaysia atau di pulau-pulau terpencil di Filipina.

Kondisi geografis yang sulit ini menambah kesulitan dalam distribusi logistik, karena memerlukan moda transportasi yang efisien dan fasilitas penyimpanan yang memadai di lokasi pemungutan suara (Sudiantini *et al.*, 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Peningkatan koordinasi antara KPU, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional sangat penting. Peningkatan koordinasi ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan logistik dan aplikasi mobile untuk pemilih. Perencanaan yang matang dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan logistik pemilu tiba di lokasi pemungutan suara tepat waktu. Perencanaan ini meliputi penentuan jadwal pengiriman yang tepat, pemilihan moda transportasi yang efisien, dan penyediaan fasilitas penyimpanan yang memadai di lokasi pemungutan suara.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa distribusi logistik pemilu di luar negeri menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Volume logistik yang besar, termasuk surat suara, kotak suara, dan peralatan pemungutan suara, sering kali menjadi masalah utama dalam proses distribusi. Keterlambatan pengiriman logistik sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang, serta perbedaan zona waktu antara Indonesia dan negara-negara di luar negeri. Selain itu, penyebaran pemilih

yang tersebar di berbagai negara dan wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, menambah kompleksitas dalam distribusi logistik.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU, perwakilan Indonesia di luar negeri, dan perusahaan logistik internasional. Selain itu, perencanaan yang matang dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan logistik pemilu tiba di lokasi pemungutan suara tepat waktu. Peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pelaksana logistik pemilu di luar negeri juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan logistik pemilu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Aditya, I. M. (2023). Sebaran Diaspora Indonesia di Luar Negeri. GoodStats. Diakses pada 12 Desember 2024, dari <https://goodstats.id/infographic/sebaran-diaspora-indonesia-di-luar-negeri-nRGUy>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Bachtiar, J., Jandhana, I. P., & Siahaan, T. (2023). Peran Bandar Udara Dalam Meningkatkan Efektivitas Distribusi Logistik Industri Pertahanan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3375-3383.
- Budhiarti, I. (2024). Evaluasi Tata Kelola Pemilu Tahun 2024 Di Luar Negeri. *Abdi Bhara*, 3(1), 86-93.
- Ginting, A. M. (2016). Kendala

- pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 4(1).
- Inradjaja, N., Abid, M. A., & Andarini, V. (2022). Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 108-119.
- Iswenda, B. A. (2024). Turut Ramaikan Pemilu 2024, Ini Sebaran Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri. *GoodStats*. Diakses pada 12 Desember 2024, dari <https://goodstats.id/article/turut-ramaikan-pemilu-2024-ini-sebaran-daftar-pemilih-tetap-luar-negeri-sb180>
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.
- Marwiyah, S. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1513-1525.
- Nusantara, B. G. (2017). Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Setiawan, A. (2020). Politik luar negeri Indonesia era Covid-19: Penyelamatan dan kerjasama. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2), 65-74.
- Sudiantini, D., Wulandari, I., Devianti, F. F., Sudirman, M., Gunawan, N. A., & Diah, A. (2023). Analisis Pengaruh Globalisasi terhadap Strategi Logistik Pada Perusahaan Multinasional (PT KAI Logistik). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(6), 31-40.
- Suwartono, R. D. B. (2023). Ikhtiar Peningkatan Keterwakilan melalui Pembentukan Dapil Luar Negeri: Evaluasi terhadap Pemilu. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 1, No. 4, pp. 67-78).
- Warganegara, A. (2019). Evaluasi pilkada serentak 2015 dan pemilu 2019: sebuah catatan singkat. *Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat*, 13(1), 1-6.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 222-243.